

# **PENGARUH SUMBER DAYA DAN DISPOSISI TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK**

Oleh:  
**EMİY DWI HADISTIA**  
NIM. E01112069

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*Email : [emiydwi50@gmail.com](mailto:emiydwi50@gmail.com)*

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang belum berhasil, yaitu masih banyak masyarakat Kota Pontianak yang tidak memiliki akta kelahiran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan melalui uji korelasi ganda dan regresi ganda dengan menggunakan sampel jenuh yaitu sebanyak 22 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian ini dikarenakan penulis berusaha mengukur pengaruh sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran dengan jenis penelitian asosiatif/hubungan kausal. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Hasil perhitungan dengan menggunakan korelasi ganda bahwa sumber daya dan disposisi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebesar 0,527 dan taraf signifikansi 0,005. Hasil dari perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa pengaruh sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yaitu sebesar 27,7% sedangkan sisanya 72,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dalam implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak peneliti menyarankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan mempertahankan disposisi yang baik didalam memberikan pelayanan pembuatan akta kelahiran.

Kata-kata Kunci :, Implementasi, Kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran, Sumber Daya, Disposisi

# THE EFFECT OF RESOURCES AND DISPOSITION ON SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF BIRTH CERTIFICATE PROCESSING AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRY OFFICE OF PONTIANAK CITY

## Abstract

This research aims to find out and analyze the effect of resources and disposition on successful implementation of the policy of the birth certificate processing at the Office of Population and Civil Registry Pontianak City. The research was based on the problems regarding the implementation of birth certificate at the Office of Population and Civil Registry Pontianak City in which many people in Pontianak do not have birth certificates. This research used a quantitative method. The research was carried out using multiple correlation and multiple regression with a sample of 22 employees of the Office of Population and Civil Registry Pontianak City. The use of quantitative method in research is because the the research sought to measure the effects of resources and disposition on successful implementation of the policy of the birth certificate processing with the associative research/causal relationship. The hypothesis is there are significant effects of resources and disposition on successful implementation of the policy of the birth certificate processing at the Office of Population and Civil Registry Pontianak City. The results using multiple correlation showed that resources and disposition had an effect on the successful implementation of the policy of the birth certificate processing at the Office of Population and Civil Registry Pontianak City by 0.527 and with a significance level of 0.005. The results of the calculation of the coefficient of determination indicated that the effect of resources and disposition on on successful implementation of the policy of the birth certificate processing at the Office of Population and Civil Registry Pontianak City was as much as 27.7% while the remaining 72.3% was affected by other factors not covered in this research. In implementing the policy of the birth certificate processing, it is suggested that the Office of Population and Civil Registry of Pontianak City should continue to provide good service to the community and maintain good disposition in providing services related to the birth certificate.

*Keywords: implementation, policy of birth certificate processing, resources, disposition*

## A. PENDAHULUAN

dokumen pencatatan kelahiran yaitu akta kelahiran.

### 1. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia yang berhak

Akta kelahiran adalah awal dari pendaftaran warga negara dihadapan hukum Indonesia. Dalam pengertian yang lebih konkrit, pencatatan "kelahiran" memberikan pengakuan hukum dari Negara seperti identitas, silsilah dan kewarganegaraan seseorang, yang diwujudkan melalui

mengeluarkan akta kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga setiap peristiwa kelahiran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat perlu didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran. Hal ini agar kedudukan hukum dan status seseorang itu

dapat dilihat sewaktu-waktu dengan memiliki alat bukti yang otentik.

Akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan hidup. Anak yang lahir merupakan tanggung jawab dari orang tua dalam memastikan bahwa anak dibesarkan dengan benar sehingga dapat tumbuh menjadi seseorang yang berguna, termasuk dalam memastikan bahwa anak secara hukum terdaftar dan memiliki akta kelahiran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak no. 01 tahun 2008, pada pasal 4 yang menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada registrar dan pejabat pencatatan sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pontianak memberikan pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Salah satu pelayanan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pontianak adalah

pelayanan pencatatan kelahiran (kutipan akta kelahiran).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak no. 01 tahun 2008, pada pasal 22 menyatakan bahwa (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah kepada Pejabat Pencatatan Sipil melalui Ketua RT setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Akta kelahiran merupakan bentuk identitas pertama yang diberikan kepada setiap warga negara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Masih banyak penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran, terutama anak-anak akibatnya banyak dari anak-anak tersebut kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Dalam penanganan perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH), anak juga sering dirugikan dan kehilangan haknya karena penentuan usia di proses peradilan berdasarkan akta kelahiran.

Seharusnya akta kelahiran yang menjadi identitas pertama yang diberikan kepada setiap warga negara, terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, dan tumbuh kembang anak. Ada tiga alasan pentingnya pencatatan kelahiran yaitu :

- a. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak secara individual terhadap Negara dan status anak dalam hukum.
- b. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional untuk anak-anak.
- c. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain misalnya identifikasi anak sesudah berperang, ditelantarkan atau diculik agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir di luar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya: pekerjaan, rekrutmen ABRI, dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi.

Dalam berbagai bentuk peraturan yang ada menyatakan bahwa begitu pentingnya pencatatan kelahiran anak sebagai upaya perlindungan hak anak dari mulai mendapatkan perlindungan, penghidupan yang layak, pendidikan dan status

kewarganegaraan serta masih banyak lagi yang lainnya. Pada prakteknya ternyata di Kota Pontianak masih banyak penduduk yang tidak dicatatkan kelahirannya atau tidak punya akta kelahiran.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa pada tahun 2014 masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran. Dari jumlah 645.541 jiwa penduduk Kota Pontianak, yang memiliki akta kelahiran adalah 462.555 jiwa atau 71.65%, dan yang tidak memiliki akta kelahiran ada 182.986 atau 28.35%. Pada tahun 2015, menurut data yang telah diperoleh dari bulan Januari-Juni terjadi peningkatan jumlah penduduk Kota Pontianak yang tidak memiliki akta kelahiran. Dari 651.927 jiwa penduduk Kota Pontianak yang memiliki akta kelahiran adalah 334.560 jiwa atau 51.31%, sedangkan sisanya adalah penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran yaitu 317.367 jiwa atau 48.69%.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Sheila Raeditha pada tahun 2013 terdapat beberapa kasus, yaitu dari aspek sumber daya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak jika dilihat dari pendidikan sudah memadai, karena rata-rata pegawai memiliki pendidikan Strata 1 (S1). Namun dari segi

kecakapan para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak masih memiliki kelemahan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang berkaitan dengan akta kelahiran, selain itu petugas juga tidak tanggap dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Dan kemudian dari aspek disposisi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, para pegawai yang melaksanakan kegiatan pembuatan akta kelahiran tidak dapat memberikan jawaban yang pasti kepada masyarakat mengenai keterlambatan waktu penyelesaian akta kelahiran. Sehingga masyarakat Kota Pontianak berpendapat bahwa kepemilikan Akta kelahiran tidak begitu penting bagi mereka, masih rendahnya pemahaman orang tua tentang kekuatan hukum dari akta kelahiran sehingga menyebabkan masyarakat di Kota Pontianak tidak berpartisipasi untuk membuat akta kelahiran. Orang tua sering mengabaikan kebutuhan untuk mendaftarkan akta kelahiran bagi anak-anak mereka.

Akta kelahiran mempunyai bukti tertulis seorang anak atas identitas kewarganegaraan atau orang tua yang melahirkannya, selain itu akta kelahiran bisa

menentukan hak waris. Hak waris adalah hak untuk mendapatkan bagian dari harta yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia. Karena tidak adanya kepemilikan akta kelahiran anak tidak bisa mendapatkan hak waris. Akta kelahiran wajib dimiliki oleh semua masyarakat, dan akta kelahiran wajib dimiliki baik yang mempunyai keluarga atau anak yang tidak memiliki keluarga. Sedangkan pada anak yang orang tuanya tidak memiliki akta nikah, maka pada saat melaporkan kelahiran sampai penerbitan kutipan akta kelahirannya tidak dibolehkan mencantumkan nama ayahnya pada kutipan akta kelahiran tersebut.

Terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi masyarakat enggan untuk membuat akta kelahiran berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu:

- a. Pegawai yang memberikan pelayanan pembuatan akta kelahiran, yang belum mencukupi sehingga sering menimbulkan antrian yang panjang untuk mendaftarkan pembuatan akta kelahiran.
- b. Membutuhkan waktu yang lama untuk membuat akta kelahiran, padahal berdasarkan SOP (Standar Operational Prosedur) maksimal 14 hari.
- c. Biaya yang harus dikeluarkan orang tua untuk mendapatkan akta kelahiran, jika

telah melewati batas waktu 60 hari setelah kelahiran yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pontianak No.9 Tahun 2012, pasal 83 yang menyatakan bahwa setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal: 1. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) atau pasal 23 ayat (4) atau pasal 24 ayat (6) atau pasal 25 ayat (1) atau pasal 27 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Melihat masalah yang terjadi diatas yang menyebabkan masih banyak masyarakat Kota Pontianak yang tidak memiliki akta kelahiran. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, antara lain:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikaf atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya

Berdasarkan fenomena yang terjadi, masih banyak dari masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari fenomena tersebut berdasarkan teori menurut Donal Van Metter dan Carl Van Horn, peneliti menduga bahwa faktor yang paling kuat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah faktor sumber daya dan disposisi. Kerena masih kurangnya jumlah pegawai yang memiliki kemampuan dan berkompeten dalam melaksanakan kebijakan pembuatan akta kelahiran, serta waktu pembuatan akta kelahiran yang masih tidak sesuai dengan SOP (Standar Operational Prosedur) yang berlaku. Dan adanya kecenderungan (*disposition*) dari para pelaksana kebijakan yang juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dan penelitiannya berjudul ***“Pengaruh Sumber Daya dan Disposisi terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak”***.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang hendak diteliti, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah ada pengaruh sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak?

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mendiskripsikan sumber daya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
- b. Untuk mendiskripsikan disposisi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
- c. Untuk mendiskripsikan keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
- d. Untuk menguji pengaruh sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

## 4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi perkembangan ilmu administrasi publik, terutama yang berkaitan erat dengan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan masukan dalam pelaksanaan kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Sehingga aparatur pemerintah menjadi lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya agar tujuan dari suatu kebijakan dapat tercapai.

## B. KAJIAN TEORI DAN METODOLOGI

### 1. Kajian Teori

Thomas R. Dye (dalam Agustino, 2012:7) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan, dalam definisi ini terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan

pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan pemerintah.

Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Agustino, 2012:139) mengatakan implementasi kebijakan, sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Sedangkan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:106) menyatakan bahwa terdapat berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan yaitu:

a. Akses

Dalam hal ini akses mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan.

b. Cakupan

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau oleh kebijakan publik yang di implementasikan.

c. Frekuensi

Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program.

d. Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran kebijakan.

e. *Service delivery* (ketepatan layanan)

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak.

f. Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan implementor dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

g. Kesesuaian program dengan kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

Menurut Donal Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Agustino, 2012:142) keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur sumber daya, antara lain yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Oleh karena itu yang terpenting dari sumber daya manusia ini adalah kompetensi dan kapabilitas dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial merupakan indikator yang penting, dimana ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana dari anggaran tidak tersedia, maka

memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Sumber daya finansial yang dimaksud mencakup dana atau perangkat (*incentive*) lain yang mendorong dan mempelancar implementasi agar berjalan secara efektif.

c. Sumber Daya Waktu

Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini dapat menjadi penyebab ketidak berhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya waktu terkait dengan kuantitas waktu yang tersedia untuk melaksanakan suatu program atau suatu kebijakan tersebut.

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Winarno, 2014:168) bahwa disposisi adalah kecenderungan dari para pelaksana kebijakan yang setiap komponen dari model kebijakan tersebut harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Terdapat beberapa indikator dari disposisi, yaitu:

a. Kognisi

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu

hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Kegagalan dari suatu kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

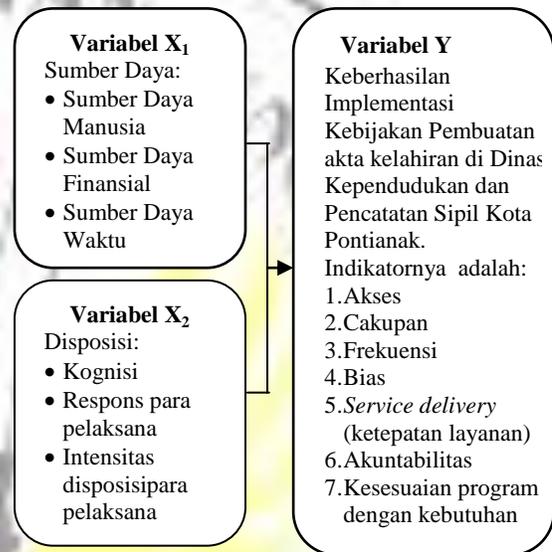
b. Respons para pelaksana terhadap kebijakan

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, respons dari para pelaksana yang mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni: tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

c. Intensitas disposisi para pelaksana

Dalam pelaksanaan kebijakan, bahwa intensitas *disposition* para pelaksana yaitu referensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program.

### Kerangka Pikir Penelitian



Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn, serta kerangka pikir yang telah dipaparkan diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

“Ada pengaruh sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak”.

## 2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan pada maksud dan tujuannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori (dalam Silalahi, 2012:30) adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan hubungan penelitian yang digunakan adalah hubungan kausal (sebab akibat).

Tempat penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan oleh penulis berjumlah 22 orang. Dipilihnya 22 orang populasi dalam penelitian ini, karena 22 orang inilah yang bertanggungjawab dibagian pencatatan sipil dan pelayanan pencatatan sipil. Terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan, 1 orang Seksi Pengolahan Data Kependudukan, 1 orang Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Kependudukan, 1 orang Kabid Pelayanan Penduduk, 1 orang Kasi Mutasi Penduduk, 1 orang Kasi Identitas Penduduk, 7 orang staf di bagian pelayanan kependudukan, 1 orang Kabid Pencatatan Sipil, 1 orang Kasi Kelahiran, Kematian dan Pengesahan Anak, 1 orang

Kasi Dokumentasi, dan 6 orang staf di bagian pencatatan sipil.

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah angket dengan menggunakan skala likert, dan alat-alat yang mendukung dokumentasi. Uji validitas instrumen menggunakan rumus Product Moment dengan bantuan SPSS 22 for Windows. Uji Reliabilitas instrumen menggunakan rumus Cronbach's Alpha dengan bantuan SPSS 18 for Windows. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

### a. Penyebaran angket/kuesioner

Yaitu dengan membagikan angket berisi beberapa item pernyataan kepada responden. Item-item pernyataan tersebut sudah dilengkapi alternatif jawaban sehingga responden tinggal memilih salah satu alternatif jawaban yang dianggap paling tepat.

### b. Dokumentasi

Yaitu dengan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan penelitian seperti jumlah penduduk Kota Pontianak, jumlah penduduk berdasarkan usia, jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran dan hal lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Diskripsi Variabel Sumber Daya**

Pernyataan responden tentang sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu. Pada variabel sumber daya dari jumlah 22 responden, jawaban responden yang terbanyak menempati kategori sangat baik (nilai interval 39 – 48) yaitu sejumlah 13 responden atau sebesar 59,09%, 9 responden atau sebesar 40,91% menempati kategori baik (nilai interval 30 – <39), dan tidak ada satupun responden yang menyatakan tidak baik dan kurang baik. Berdasarkan perhitungan rata-rata variabel sumber daya diketahui bahwa variabel sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pontianak termasuk dalam kategori sangat baik (nilai interval 39–48).

### **2. Hasil Diskripsi Variabel Disposisi**

Pernyataan responden tentang disposisi yang terdiri dari kognisi (pemahaman), respons para pelaksana dan intensitas disposisi. Pada variabel disposisi

dari jumlah 22 responden, jawaban responden yang terbanyak menempati kategori sangat baik (nilai interval 32,5–40) yaitu sejumlah 12 responden atau sebesar 54,44%, 10 responden atau sebesar 45,45% menempati kategori baik (nilai interval 25–<32,5), dan tidak ada satupun responden yang menyatakan tidak baik dan kurang baik. Berdasarkan perhitungan rata-rata variabel disposisi diketahui bahwa variabel disposisi yang terdiri dari kognisi (pemahaman), respons para pelaksana, dan intensitas disposisi di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pontianak termasuk dalam kategori sangat baik (nilai interval 32,5 – 40).

### **3. Hasil Diskripsi Variabel Keberhasilan Implementasi Kebijakan**

Pernyataan responden tentang keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiranyang terdiri dari akses, cakupan, frekuensi, bias, *service delivery* (ketepatan layanan), akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Pada variabel disposisi dari jumlah 22 responden, jawaban responden yang terbanyak menempati kategori sangat baik (nilai interval 78–96) yaitu sejumlah 16 responden atau sebesar 72,73%, 6 responden

atau sebesar 27,27% menempati kategori baik (nilai interval 60 – <78), dan tidak ada satupun responden yang menyatakan tidak baik dan kurang baik. Berdasarkan perhitungan rata-rata variabel keberhasilan implementasi kebijakan diketahui bahwa variabel keberhasilan implementasi kebijakan yang terdiri dari akses, cakupan, frekuensi, bias, *service delivery* (ketepatan layanan), akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak termasuk dalam kategori sangat baik (nilai interval 78–96).

#### 4. Analisis Korelasi Ganda

Berdasarkan analisis korelasi ganda diketahui bahwa koefisien korelasi ganda (R) antara sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berjumlah sebesar 0,527. Berdasarkan hasil analisis korelasi yang terdapat dalam tabel hasil analisis korelasi  $X_1, X_2$  dan Y diketahui koefisien korelasi adalah 0,527. Jika koefisien korelasi ini dibandingkan pada tabel pedoman memberikan interpretasi koefisien korelasi, koefisien korelasi berada pada interval 0.40–0.599 dengan tingkat hubungan yang

sedang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korelasi antara variabel sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sedang.

#### 5. Analisis Regresi Ganda

Analisis regresi berganda terdiri dari dua variabel bebas yaitu sumber daya ( $X_1$ ) dan disposisi ( $X_2$ ) dan variabel terikat yaitu keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak peneliti menggunakan aplikasi *IBM SPSS 22 for Windows*. Dapat dilihat bahwa persamaan linear berganda adalah  $Y = 48.812 + 0,253X_1 + 0,758X_2$ . Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa angka koefisien regresi dari variabel sumber daya ( $X_1$ ) berjumlah 0,253 yang berarti bahwa setiap satu nilai kita substitusi pada  $X_1$  maka akan terjadi peningkatan keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran sebesar 0,253 satuan kerja dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap.

Dan angka koefisien regresi dari variabel disposisi ( $X_2$ ) berjumlah 0,758 menunjukkan

bahwa setiap satu nilai kita substitusi pada  $X_2$  maka akan terjadi peningkatan keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran sebesar 0,253 satuan kerja dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap. Sedangkan angka koefisien konstanta berjumlah 48.812 menunjukkan bahwa apabila tidak ada sama sekali pengaruh dari variabel sumber daya dan disposisi, maka keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak akan tetap 48,812 poin. Kondisi ini terjadi dikarenakan adanya pengaruh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 6. Analisis Determinasi

Perhitungan koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *IBM SPSS 22 for Windows*. Koefisien determinasi adalah  $KD = (0,277) \times 100\% = 27,7\%$ . Hasil dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa pengaruh variabel sumber daya dan disposisi secara bersama-sama terhadap variabel keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berjumlah 27,7%. Sedangkan sisanya yaitu berjumlah

72,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, maka dapat disimpulkan :

1. Distribusi skor mengenai deskripsi variabel sumber daya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan rata-rata variabel sumber daya diketahui berjumlah (59,09%) termasuk kategori sangat baik terletak pada interval 39 – 48. Dari data tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa sumber daya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kategori sangat baik.
2. Distribusi skor mengenai deskripsi variabel disposisi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari

perhitungan rata-rata variabel disposisi diketahui berjumlah (54,55%) termasuk kategori sangat baik terletak pada interval 32,5 – 40. Dari data tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa disposisi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kategori sangat baik.

3. Distribusi skor mengenai deskripsi variabel keberhasilan implementasi kebijakan (Y) pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan rata-rata variabel disposisi diketahui berjumlah 15 orang (72,73%) termasuk kategori sangat baik terletak pada interval 78 – 96. Dari data tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kategori sangat baik.
4. Pada pengujian pengaruh variabel sumber daya ( $X_1$ ) terhadap variabel keberhasilan implementasi kebijakan (Y), peneliti menggunakan analisis korelasi *product moment* dengan hasil koefisien korelasi antara variabel ( $X_1$ ) sumber daya dengan keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran (Y) yakni berjumlah 0,471. Koefisien korelasi ini

dibandingkan pada tabel pedoman memberikan interpretasi koefisien korelasi berada pada interval 0,40 – 0,599 dengan tingkat hubungan sedang. Hasil pengujian variabel sumber daya ( $X_1$ ) analisis regresi linear sederhana didapat persamaan  $Y=48,549+0,893x$ . Ini berarti berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat (keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran) berjumlah 48,549. Pengaruh variabel  $X_1$  terhadap variabel Y, nilai koefisien regresi variabel sumber daya adalah berjumlah 0,893 yang berarti setiap kenaikan pada sumber daya satu dalam satuan maka keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran berjumlah 0,893. pengaruh variabel sumber daya terhadap variabel keberhasilan implementasi kebijakan berjumlah 22,2%. Sedangkan sisanya yaitu berjumlah 77,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

5. Pada pengujian pengaruh variabel disposisi ( $X_2$ ) terhadap variabel keberhasilan implementasi kebijakan (Y), peneliti menggunakan analisis korelasi *product moment* dengan hasil koefisien korelasi antara variabel ( $X_2$ ) disposisi dengan keberhasilan implementasi

kebijakan pembuatan akta kelahiran (Y) yakni berjumlah 0,521. Koefisien korelasi ini dibandingkan pada tabel pedoman memberikan interpretasi koefisien korelasi berada pada interval 0,40 – 0,599 dengan tingkat hubungan sedang. Hasil analisis regresi linear sederhana didapat persamaan  $Y=52,237+0,960x$ . Ini berarti berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat (keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran) berjumlah 52,237. Pengaruh variabel  $X_2$  terhadap variabel Y, nilai koefisien regresi variabel disposisi adalah berjumlah 0,960 yang berarti setiap kenaikan pada sumber daya satu dalam satuan maka keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran berjumlah 0,960. Pengaruh variabel disposisi terhadap variabel keberhasilan implementasi kebijakan berjumlah 27,2%. Sedangkan sisanya yaitu berjumlah 72,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

6. Hasil pengujian hipotesis dilakukan analisis korelasi berganda menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, hasil analisis korelasi ganda antara

variabel sumber daya ( $X_1$ ), dan disposisi ( $X_2$ ) terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Y) pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak diketahui koefisien korelasinya adalah 0,527. Dan berada pada interval 0,40 – 0,599 dengan tingkat hubungan yang sedang.

7. Hasil analisis regresi linier berganda dengan menghasilkan persamaan yang berupa  $Y=48.812+0,253X_1+0,758X_2$ , ini berarti bahwa angka koefisien regresi dari variabel sumber daya berjumlah 0,253 yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat sumber daya, maka akan terjadi penurunan keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berjumlah 0,253 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap. Dan angka koefisien regresi dari variabel disposisi berjumlah 0,758 satuan menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan tingkat disposisi berjumlah satuan kerja, maka akan mengakibatkan kenaikan keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berjumlah 0,758 satuan. Ini berarti berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai

nol (0) maka nilai variabel terikat (keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran) berjumlah 48,812.

8. Hasil dari perhitungan analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh variabel sumber daya dan disposisi secara bersama-sama terhadap variabel keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berjumlah 27,7%. Sedangkan sisanya yaitu berjumlah 72,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

## E. SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini maka saran yang diajukan dapat dijadikan salah satu alternatif dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran adalah sebagai berikut :

1. Melihat sumber daya yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak termasuk dalam kategori baik. Sudah seharusnya pimpinan atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Pontianak tersebut mengambil langkah yang tepat supaya dapat terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2. Pada variabel disposisi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak termasuk dalam kategori sangat baik. Meskipun termasuk dalam kategori sangat baik, namun dapat menjadi masukan bagi pimpinan atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tersebut untuk dapat mempertahankan disposisi yang baik di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sumber daya dan disposisi memiliki pengaruh yang sedang terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini dapat menjadi pedoman untuk mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
4. Penelitian selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dapat meneliti faktor-faktor lain berjumlah 72,3% yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Utara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak. Raeditha, Syarifah Sheila. 2013. Skripsi: *Implementasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak.

## F. REFERENSI

### 1. Buku-buku:

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Suliyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

-----, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing

Winarno, Budi..2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Center of Academic Publishing Service

### 2. Skripsi

Dwinanto, Beni Arya. 2013. Skripsi: *Pengaruh Sumber Daya terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Kayong*

Sidabutar, Armitha Octarina. 2014. Skripsi: *Pengaruh Sumber Daya terhadap Keberhasilan Implementasi Program Transmigrasi di Sungai Bulan C Kabupaten Kubu Raya*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pontianak.

### 3. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 01 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : EMİY DWI HADISTIA  
 NIM / Periode lulus : E 01112069 / I  
 Tanggal Lulus : 18 Juli 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 E-mail address/ HP : emiydwi50@gmail.com / 0812 - 5734 - 3734

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (\*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

PENGARUH SUMBER DAYA DAN DISPOSISI TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBUJAKAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK

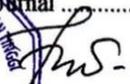
berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal .....  
  
 di Pontianak, Pos. M. AB  
 NIP. 19700905 2002 12 1003

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal :  
  
Emiy Dwi Hadistia  
 NIM. E01112069

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)